

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MAHASISWA PPDS-1
OBSTETRI GINEKOLOGI DALAM PELAYANAN
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh:

Albertus Nugraha

NIM 21.C2.0047

Kepada
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2026

ABSTRAK

Status ganda Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagai peserta didik sekaligus pelaksana pelayanan medis menciptakan ambiguitas peran yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. Permasalahan utama bersumber pada kekosongan norma serta inkonsistensi implementasi regulasi yang mencakup aspek supervisi, pendelegasian wewenang, pengaturan jam kerja, sistem remunerasi, hingga mekanisme pertanggungjawaban hukum atas dugaan malpraktik atau kesalahan medis. Kondisi ini menempatkan PPDS pada posisi yang rentan dalam menjalankan praktik klinisnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan dan implementasi perlindungan hukum bagi PPDS-1 Obstetri dan Ginekologi (Obgyn), dengan mengkaji mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam penyelesaian sengketa medis, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat efektivitas perlindungan hukum di lingkungan rumah sakit pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap subjek PPDS di berbagai institusi pendidikan terkait untuk mendapatkan gambaran realitas di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun instrumen perlindungan hukum secara normatif telah tersedia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011. Namun, pada tingkat implementasi masih ditemukan berbagai kendala signifikan. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi ketidakjelasan status hukum PPDS dalam struktur ketenagakerjaan rumah sakit, lemahnya pengawasan administratif terhadap proses supervisi, serta adanya kesenjangan yang lebar antara standar regulasi (*das sollen*) dengan praktik aktual di lapangan (*das sein*).

Simpulan penelitian ini menegaskan perlunya perubahan dan penambahan pada konsep perlindungan hukum bagi PPDS yang lebih integratif dan komprehensif guna menjamin kepastian hukum. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan adanya percepatan penyusunan regulasi turunan yang lebih teknis dan tegas, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai supervisi dan pendelegasian wewenang bertingkat, serta peningkatan edukasi kesadaran hukum bagi PPDS. Selain itu, rumah sakit pendidikan wajib mengoptimalkan perannya dalam menyediakan jaminan perlindungan hukum dan keselamatan kerja yang lebih representatif bagi seluruh peserta didik.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, PPDS-1 Obgyn, Rumah Sakit Pendidikan, Supervisi Klinis, Pertanggungjawaban Hukum.

ABSTRACT

The dual status of Specialist Medical Education Program (PPDS) members as both students and providers of medical services creates role ambiguity, leading to legal uncertainty in the provision of healthcare services in teaching hospitals. The main problem stems from a lack of norms and inconsistent implementation of regulations covering aspects of supervision, delegation of authority, work hour arrangements, remuneration systems, and legal accountability mechanisms for alleged malpractice or medical errors. This situation places PPDS in a vulnerable position in carrying out their clinical practice.

This study aims to comprehensively analyze the regulation and implementation of legal protection for PPDS-1 Obstetrics and Gynecology (Obgyn), by examining the legal accountability mechanisms in resolving medical disputes, and identifying factors that support and hinder the effectiveness of legal protection in a teaching hospital environment. The research method used is a juridical-empirical with analytical descriptive specifications. Data were collected through literature studies and in-depth interviews with PPDS subjects at various related educational institutions to obtain a picture of the reality on the ground.

*The research results show that although legal protection instruments are normatively available, as stipulated in Law Number 17 of 2023, Government Regulation Number 28 of 2024, and Minister of Health Regulation Number 2052 of 2011, significant obstacles remain at the implementation level. The main obstacles identified include the unclear legal status of PPDS within the hospital workforce structure, weak administrative oversight of the supervision process, and a wide gap between regulatory standards (*das sollen*) and actual practice in the field (*das sein*).*

The conclusions of this study emphasize the need for changes and additions to the concept of legal protection for PPDS that is more integrative and comprehensive in order to ensure legal certainty. Based on these findings, it is recommended to accelerate the development of more technical and firm derivative regulations, strengthen Standard Operating Procedures (SOPs) regarding supervision and delegation of authority at various levels, and increase legal awareness education for PPDS. Furthermore, teaching hospitals are required to optimize their role in providing more representative legal protection and occupational safety guarantees for all students.

Keywords: *Legal Protection, PPDS-1 Obgyn, Teaching Hospital, Clinical Supervision, Legal Responsibility.*